**BAB I  
PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam kehidupan ini, tidak mungkin manusia akan berdiri sendiri tanpa adanya manusia lain. Mereka akan saling bersosialisasi, bekerja sama, dan menciptakan sebuah kelompok yang akan saling menghormati, menghargai, dan sebagainya. Pastilah dari itu muncul sebuah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam suatu masyarakat luas sebagai wujud proses pembentukan keputusan, terkhusus dalam sebuah negara, dengan kata lain terbentuk sebuah sistem politik. Setiap negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda. Setiap negara akan berjuang menerapkan sistem politiknya untuk menciptakan stabilitas dan keamanan.

Umat muslim, dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir dalam menjalani persoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaan termuat di dalam pedoman tersebut. Bahkan dalam Al Qur’an dan Al Hadist permasalahan politik juga tertuang didalamnya. Diantaranya membahas: prinsip politik islam, prinsip politik luar negeri islam. Baik politik luar negeri dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.Prinsip-prinsip politik yang tertuang dalam Al Qur’an dan Al Hadist merupakan dasar politik islam yang harus diaplikasikan kedalam system yang ada.

Menurut Abdul Halim Mahmud (1998) bahwa islam juga memiliki politik luar negeri. Tujuan dari politik luar negeri tersebut adalah penyebaran dakwah kepada manusia di penjuru dunia, mengamankan batas territorial umat islam dari fitnah agama, dan system jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Jadi politik bermakna instansi dari negara untuk keamanan kedaulatan negara dan ekonomi.

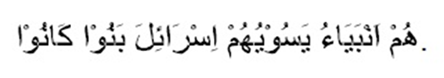
* 1. **Rumusan Masalah**
     1. Bagaimanakah pengertian dan objek kajian sistem politik Islam itu?
     2. Bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik Islam itu?
     3. Bagaimana kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional?
     4. Bagaimana peranan Islam sebagai ajaran melawan penjajahan?
  2. **Tujuan**
     1. Mengetahui pengertian dan objek kajian sistem politik Islam
     2. Mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik Islam
     3. Mengetahui kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional
     4. Mengetahui peranan Islam sebagai ajaran melawan penjajahan

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Pengertian Sistem Politik Islam dan Objek Kajiannya**

Kata sistem berasal dari bahasa asing (Inggris), yaitu *system*, artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dengan pandangan, teori, dan asas. Sedangkan kata politik pada mulanya berasal dari bahasa Yunani atau Latin, *politicos* atau *politicus*, yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata *polis*, yang berati kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata politik diartikan sebagai “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan”. Kata Islam, adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Sedangkan secara harfiyah, Politik Islam disebut juga *Fiqh Siyasah* yang dapat diartikan sebagai mengurus, mengendalikan atau memimpin sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam:



*“Adapun Bani Israel dipimpin oleh Nabi mereka.”*

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan dalam Islam (Sistem Politik). Dengan demikian, sistem politik Islam adalah sebuah aturan tentang pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Islam memang memberikan landasan kehidupan umat manusia secara lengkap, termasuk di dalamnya kehidupan politik. Tetapi Islam tidak menentukan secara konkrit bentuk kekuasaan politik seperti apa yang diajarkan dalam Islam. Itulah sebabnya, kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam merumuskan sistem politik Islam. Dalam bahasa Arab politik disebut siyasah, sehingga dalam keislaman politik diidentik dengan kata tersebut.secara etimologis siyasah artinya mengatur,aturan dan keteraturan.Fiqih siyasah adalah hukum islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Dalam islam, negara didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan islam adalah:

1.  Bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Ia yang menciptakannya. Maka, hanya Allah yang harus ditaati, orang dapat ditaati

     bila Allah memerintahkannya.

2.  Bahwa Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah

     Nabi, sedangkan Sunnah Nabi merupakan penjelasan otoratif tentang al-qur’an

Dalam kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya di terjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari akar kata sasa-yasusu, yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama, ditemukan kata sus, yang berarti penuh kuman, kutu atau rusak, sementara dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa-yasusu, namun ini bukan berarti bahwa al-Qur’an tidak menguraikan masalah sosial politik.

Banyak ulama ahli Al-Qur’an yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan al-Qur’an dan Sunnah Nabi sebagai rujukan, bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan al-Siyasah al-Syar’iyah (Politik Keagamaan). Uraian al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Kata ini pada mulanya berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. Dari akar kata yang sama, terbentuk kata hikmah, yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata sasa-yasusu-sais-siyasah, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian (M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, 1997:417).

Kata siyasah, sebagaimana dikemukakan diatas, diartikan dengan politik, dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata hikmat. Disisi lain, terdapat persamaan makna antara kata hikmah dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmah sebagai kebijaksanaaan, atau kemampuan menangani suatu masalah, sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan madharat. Dengan demikian, sistem politik Islam adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan Negara,: siapa pelaksana kekuasan tersebut, apa dasar, dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab, dan bagaimana bentuk tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai agama Islam (sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an, Hadist dan Ijtihad).

Secara garis besar, objek dalam sistem politik islam adalah:

* + - Siyaasah dusturiyah (hukum tata negara). Materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan(eksekutif, legislatif, yudikatif), instituisi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum(kepolisian), dan lain-lainnya.
    - Siyaasah dauliyyah (hukum politik yang mengatur hubungan internasional). Objek kajiannya adalah hubungan antar negara islam dengan sesma negara islam, hubungan negara islam dengan non-islam,hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, genjatan senjta, hukum kejahatan perang, dan lain-lain.
    - Siyaasah maaliyah (hukum politik yang mengatur keuangan negara). Kontens yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan negara dan pilantropi islam.

**2.2 Prinsip-prinsip Dasar dalam Sistem Politik Islam**

Dalam setiap pemerintahan Islam harus mendasarkan pada prinsip-prinsip politik dan perundang-undangan pada kitab al Qur’an dan as Sunnah yang kedua-duanya menjadi sumber pokok dari perundang-undangan yaitu pokok pegangan dalam segala aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Karena itu setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah mengikat setiap muslim untuk mentaatinya.

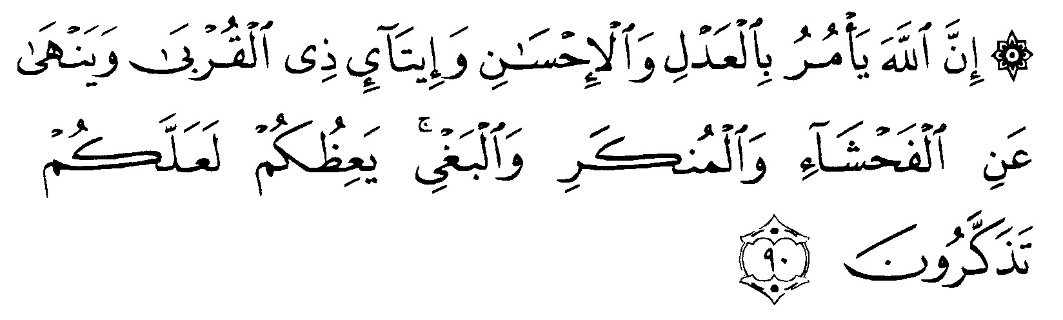
Berikut merupakan prinsip dasar sistem politik islam :

* **Al-amanah.** Kekuasaan adalah amanah (titipan), maksudnya titipan tuhan. Amanah tidak bersifat permanen tetapi sementara. Sewaktu-waktu pemilik yang sebenarnya dapat mengambilnya.setiap yang diberi amanah akan dimintai pertanggung jawaban. Nabi Muhamad Shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda:

*“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban mengenai kepemimpinan dan rakyat yang dipimpinnya.[H.R Bukhari No.4789]*

* **Al-adalah.** Kekuasaan harus didasarkan pada prinsip keadilan.

Kata ini sering digunakan dalam al Qur’an dan telah dimanfaatkan secara terus menerus untuk membangun teori kenegaraan [Islam](http://s-hukum.blogspot.com/search/label/Islam?&max-results=8). Prinsip keadilan banyak sekali ayat al Qur’an memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia seperti firman Allah:

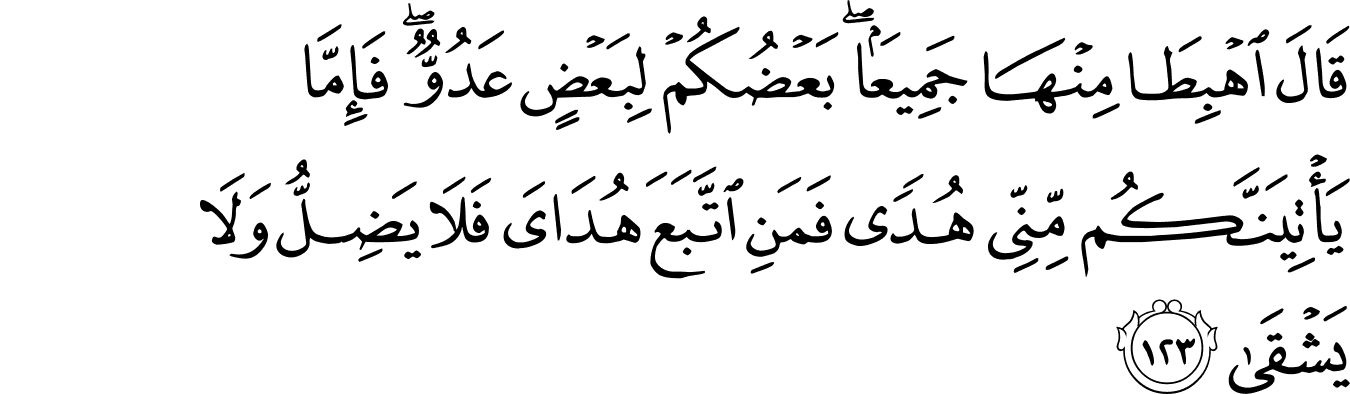


*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran danpermusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil pelajaran*” [Q.S An-Nahl:90].

Ayat di atas memerintahkan umat [Islam](http://s-hukum.blogspot.com/search/label/Islam?&max-results=8) untuk berbuat adil, sebaliknya melarang mengancam dengan sanksi[hukum](http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum) bagi orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, jadi kedudukan prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan Islam harus menjadi alat pengukur dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai sosial masyarakat yang tanpa dibatasi kurun waktu. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan dzalim, mempunyai tingkatan yang amat tinggi dalam struktur kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Dijadikan keadilan sebagai prinsip politik [Islam](http://s-hukum.blogspot.com/search/label/Islam?&max-results=8), maka mengandung suatu konsekuensi bahwa para penguasa atau penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga berlaku adil terhadap suatu perkara yang dihadapi, penguasa haruslah adil dan mempertimbangkan beberapa hak warganya dan juga mempertimbangkan kebebasan berbuat bagi warganya berdasarkan kewajiban yang telah mereka laksanakan. Adil menjadi prinsip politik [Islam](http://s-hukum.blogspot.com/search/label/Islam?&max-results=8) dikenakan pada penguasa untuk melaksanakan pemerintahannya dan bagi warganya harus pula adil dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh keadilannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang.

* **Al- Hurriyah.**  Al-hurriyah artinya kebebasan atau kemerdekaan. Adalah merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh [Islam](http://s-hukum.blogspot.com/search/label/Islam?&max-results=8" \t "_blank), yang dimaksud di sini bukan kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik, maksud kebebasan berfikir untuk menentukam mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga proses berfikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya, kebebasan berfikir dan kebebasan berbuat ini pernah diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa serta iblis agar mereka turun dari surga[[1]](#footnote-1), untuk mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya :

**

*“Berkata (Allah) : Turunlah kamu berdua dari surga bersamasama sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk dari-Ku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka” (Q.S. Toha : 123).*

Jadi maksud ayat tersebut di atas adalah kebebasan yang mempunyai akibat yang berbeda, barangsiapa yang memilih melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, maka iapun akan dibalas dengan keburukan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan.

* **Al-Musawah.** Al-Musawah adalah kesetaraan, kesejajaran, kesamaan. Siyasah harus dibangun di atas fondasi kesamaan dan kesetaraan. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Ada kurang lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu:

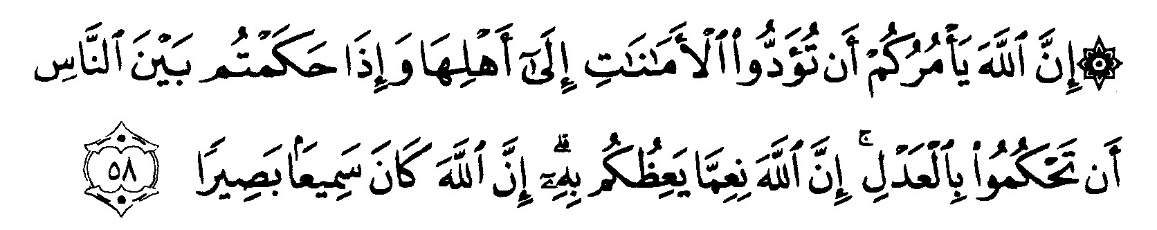
1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan : Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya.

2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu; Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).

3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.

4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang seringkali didengungkan al-Quran dalam menetapkan hukum,



“…Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil...” (QS. Al-Nisa: 58)

Hal ini merupakan perintah Allah Swt. yang menganjurkan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Karena itulah maka Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia.[[2]](#footnote-2)

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.

* **Tabadul al-Ijtima.** Tabadul al-ijtima artinya tanggung jawab sosial. Siyāsah tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Secara individual, kekuasaan merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan bagi para pelakunya, mewujudkan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan pilantropi Islam dengan baik, misalnya, dalam membangun manajemen zakat, infak, sedekah dan wakaf, atau dalam membuka lapangan kerja secara luas dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat yang membutuhkannya.

**2.3 Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional**

Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam.

Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini.

Sekarang mari kita amati kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional di setiap era/masa bangsa ini:

**a. Fase Sebelum Kemerdekaan**

Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut berjuang melawan penindasan dan kedloliman penjajah yang dipimpin oleh tokoh muslim. Diantara tokoh muslim pada era itu adalah Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tuanku Nan Ranceh, Sultan Badaruddin, dan lain-lain.

Selain itu, memasuki era pergerakan nasional, perjuangan melawan kolonial terpecah menjadi dua kelompok besar yaitu: Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler.

**b. Fase Kemerdekaan**

Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam komunisme dengan segala intriknya.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI. Baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara.

Para pemimpin Islam terutama dari Serikat Islam pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofis negara.

**c. Era Orde Lama**

Setelah kemerdekaan, para pemimpin menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengakui nilai keagamaan yang positif, karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan, dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. Selain Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. Majelis Ulama ini pertama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan, seperti dakwah dan pendidikan.

**d. Era Orde Baru**

Pemerintahan masa orde baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam.

Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama di sebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum subtansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik.

**e. Era Reformasi**

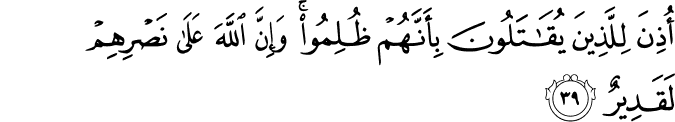
Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketua Nahdatul Ulama. Muncul juga nama Nurcholis Majid (Cak Nur), cendikiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhamadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan.

Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam. Kemudian bermunculanlah berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Partai-partai politik yang berasaskan Islam, antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain.

**2.4. Peranan Islam Sebagai Ajaran Melawan Penjajahan**

Ajaran Islam yang dipeluk oleh sebagaian besar rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi besar, serta dorongan semangat, dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Tertanamnya “Ruhul Islam” yang di dalamnya memuat antara lain :

1. **Jihad fi Sabilillah,** telah memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Dengan semangat Jihad, umat akan melawan penjajah yang dlolim, termasuk perang suci, bila wafat syahid, surga imbalannya.
2. **Ijin Berperang Dari Allah SWT.**



*“Telah diijinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu dijajah/ditindas, maka Allah akan membela mereka (yang diperangi dan ditindas)”.* (Q.S. Al Haj : 39)

Ini adalah ayat pertama mengenai jihad. Dia Mahakuasa menolong hamba-hamba-Nya yang beriman tanpa peperangan. Akan tetapi, Dia menghendaki hamba-hamba-Nya untuk mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin dalam rangka taat kepada-Nya.[[3]](#footnote-3)

1. **Symbolbegrijpen** (Simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat), yaitu “TAKBIR” Allahu Akbar, selalu berkumandang dalam era perjuangan umat Islam di Indonesia.
2. **“Khubul Wathon minal Iman”,** cinta tanah air sebagian dari Iman, menjadikan semangat Partiotik bagi umat Islam dalam melawan penjajahan.

**BAB III**

**PENUTUP**

**3.1 Kesimpulan**

1. Sistem politik Islam adalah sebuah aturan tentang pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Secara garis besar politik Islam membahas masalah-masalah ketatanegaraan (siyasah dusturiyyah), hukum internasional (siyasah dauliyyah), dan hukum yang mengatur politik keuangan negara (siyasah maaliyyah).
3. Prinsip-prinsip dasar dari politik Islam adalah Al-Amanah (titipan), Al-Adalah (prinsip keadilan), Al-Hurriyyah (kemerdekaan dan kebebasan), Al-Musawah (kesetaraan, kesamaan), Tabadul al-Ijtima (tanggung jawab sosial).
4. Umat Islam mempunyai peranan yang sangat penting, berjasa, dan tidak dapat diabaikan dalam perjuangan di Indonesia.
5. Islam sebagai ajaran melawan penjajahan menanamkan “Ruhul Islam” yang memuat Jihad fi Sabilillah, Ijin berperang dari Allah SWT, Symbolbergrijpen, dan Khubul wathon minal Iman.

**3.2 Saran**

Setelah penyusunan makalah ini, penyusun memberi saran kepada pembaca sebagai umat Islam yang hidup dalam alam modern ini agar dapat berinteraksi dengan politik Islam, karena akan memberikan pengalaman dan tantangan baru menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berpolitik yang bersih dan sehat dan sesuai ketentuan Islam akan menambah kepercayaan masyarakat khususnya di Indonesia bahwa memang Islam dapat mengatur seluruh aspek mulai ekonomi, sosial, militer, budaya sampai dengan politik.

1. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 16, Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003, hlm. 424 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibnu Katsir*, Tafsir Ibnu Katsir,* Juz 5, 2005. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 289 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 17, Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003, hlm. 540 [↑](#footnote-ref-3)